

INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam

ISSN : 2809-7645

E-ISSN : 2809-7653

DOI :

Vol. 3 No. 2, 2023

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/interaksi>



Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Pengembangan Identitas Politik Perempuan

Nursaidah Lubis¹⁾, Hasan Sazali²⁾, Icol Dianto³⁾, Mohd. Rafiq⁴⁾, Sholeh Fikri⁵⁾

¹⁾Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

²⁾Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara, Indonesia

^{3,4,5)}Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email:

noersyaidah96@gmail.com

Keywords

Identitas Politik; Politisi Perempuan; Media Sosial; Instagram

ABSTRACT

Media sosial menjadi kekuatan besar yang mengubah dinamika kehidupan manusia. Media sosial tidak hanya menjadi alat promosi dan informasi tetapi juga membentuk identitas politik perempuan, membantu mereka mengatasi stereotip yang melemahkan. Artikel ini mengkaji dampak penggunaan media sosial Instagram oleh politisi perempuan setelah terpilih menjadi pejabat publik. Melalui penelitian kualitatif, peneliti menganalisis konten foto dan video yang diunggah oleh politisi perempuan pada akun Instagram pribadi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menjadi pejabat publik para politisi perempuan tetap aktif dalam menggunakan media sosial Instagram. Selain aktivitas politik, konten pribadi seperti foto keluarga juga sering diunggah sehingga menciptakan narasi identitas yang kompleks. Politisi perempuan tidak hanya menjaga integritas politik tetapi juga menunjukkan kehidupan pribadi sebagai upaya untuk menghilangkan stereotip tradisional. Penelitian ini memberikan kontribusi tentang bagaimana media sosial, khususnya Instagram, dapat menjadi alat penting dalam pembentukan identitas politik perempuan di Indonesia.

Introduction

Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan berkomunikasi secara global. Keberadaan media sosial telah mengubah cara manusia berkomunikasi, berbagi informasi, dan membangun hubungan pribadi dan profesional. Bahkan dewasa ini, media sosial menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi (Dianto et al., 2021; Khusairi, 2019). Pengguna media sosial dapat membuat profil pribadi, berbagi pemikiran, foto, dan video, serta terlibat dalam percakapan dengan orang-orang di seluruh dunia.

Penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi politik telah dimulai Barack Obama dan berhasil mengantarkannya menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 2008 (Patterson, 2016). Obama yang merupakan politisi menggunakan popularitas dan aksesibilitas dari media sosial untuk mendukung dan memobilisasi citra diri dan orientasi politiknya (Bossetta, 2018). Berbeda dengan Donald Trump, ranah pribadi dan profesionalnya sebagai presiden menjadi tidak terbatas (Beers, 2014). Kebiasaan Trump yang kerap kali mengungkapkan pendapat pribadi secara emosional dan tidak terlalu menampilkan profesionalismenya sebagai kepala Negara (Kozakowska & Kampka, 2021).

Penggunaan media sosial cenderung menyalurkan kembali dari keseimbangan kekuasaan di antara aktor politik yang terpinggirkan seperti perempuan dan minoritas (Dianto et al., 2021). Hal ini tergambarkan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait itu (Krippendorff, 2004). Bias gender menyebabkan lahirnya tuntutan terhadap pemimpin perempuan yang harus memenuhi kriteria yang berbeda dengan pemimpin laki-laki (Amaliatulwalidain et al., 2022). Stereotip karakteristik perempuan dan ranah domestiknya masih mempengaruhi citra perempuan dalam politik dan menjadi alasan ketidakmampuan perempuan dalam berkiprah di dunia politik (Turnbull & Dugarte, 2019). Kondisi tersebut menjadi siklus yang berkelanjutan yang memberikan bias terhadap perempuan dalam politik.

Instagram memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menarik bagi berbagai kalangan, terutama dalam membangun personal branding (Prihatiningrum & Kusmiati, 2023). Instagram merupakan platform berbasis gambar dan video, memungkinkan

pengguna untuk berbagi momen dalam format visual (Fahmy et al., 2014). Media sosial instagram dapat mengubah lanskap politik, memberikan peluang baru untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih. Instagram, dengan fokus pada konten visual (Musdalifah et al., 2022), memungkinkan politisi perempuan untuk merancang naratif visual yang kuat dan personal, memperkenalkan sisi manusiawi mereka, dan menjembatani kesenjangan antara pemimpin dan pemilih. Dengan demikian, penggunaan Instagram diasumsikan menjadi ruang yang tepat bagi perempuan untuk mempropagandakan narasi politik sehingga terbebas dari stereotip yang melemahkan citra perempuan.

Beberapa penelitian tentang pemanfaatan Instagram untuk komunikasi politik telah dilakukan. Hidayati meneliti tentang branding pemimpin politik di media sosial (Hidayati, 2021), Hubungan penggunaan media sosial dengan demokrasi dan opini publik (Susanto & Irwansyah, 2021), dan penggunaan instagram untuk transparansi pemerintahan (Prihatiningrum & Kusmiati, 2023). Penelitian ini mengambil fokus pada branding politisi perempuan di media sosial Instagram. Interaksi yang terjalin melalui media sosial instagram menyebabkan terbangunnya hubungan tanpa batas sehingga lenyap stereotip berbasis gender (Rosyidah & Nurwati, 2019).

Pertanyaannya adalah apakah jika para politisi perempuan itu sudah terpilih dan mendapat tanggung jawab atas jabatan tertentu di pemerintahan, apakah masih menggunakan media sosial Instagram dalam melakukan komunikasi politik? Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan menganalisis penggunaan media sosial Instagram oleh para politisi perempuan, dan bagaimana pembentukan identitas politik perempuan melalui Instagram.

Research Method

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, tujuannya untuk menjelaskan identitas politik perempuan di media sosial Instagram. Data dalam penelitian ini adalah data digital dari akun instagram Puan Maharani, Tri Rismaharini, dan Khofifah Indar Parawansa. Analisis data digital tersebut dengan menggunakan data dalam bentuk

konten foto dan video yang diunggah oleh para politisi perempuan di media Instagram. Tahapan analisis meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data penelitian dilakukan pada tahap awal, kemudian menganalisis data secara terus-menerus, melakukan reduksi data, dan disesuaikan dengan pengkategorian yang telah ditentukan sebelumnya, lalu terakhir melakukan interpretasi data (Abdussamad, 2021).

Konten foto dan video diklasifikasikan menjadi lima kategori. Pertama, unggahan foto atau video yang berupa konten berisi tentang kehidupan pribadi dan keluarga. Kategori kedua berupa unggahan foto dan video yang berisi konten terkait pekerjaan atau profesi politisi perempuan seperti kunjungan kerja dan rapat kerja. Berikutnya yang ketiga unggahan foto dan video berupa konten terkait kegiatan politik, di antaranya seperti partai politik (Iwanaga, 2008). Berikutnya kategori yang keempat yaitu foto dan video yang berisi konten berupa hal-hal keagamaan secara pribadi dari sosok politisi perempuan yang menjadi objek penelitian ini. Terakhir, kategori nasionalisme berupa foto atau video yang diunggah memiliki tema nasionalisme seperti memperingati hari-hari besar nasional.

Setelah menentukan lima macam kategori unggahan foto dan video pada Instagram pribadi para politisi perempuan yang menjadi objek penelitian ini, maka selanjutnya peneliti memilih tiga orang tokoh politisi perempuan Indonesia. Indikator yang menjadi alasan peneliti memilih ketiga tokoh tersebut adalah popularitas dan integritas. Berikut ini deskripsi dari masing-masing tokoh politisi perempuan tersebut.

a. Puan Maharani

Berdasarkan data yang dikutip dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (www.dpr.go.id) dijelaskan bahwa Puan Maharani lahir di Jakarta pada tanggal 6 September 1973. Jabatan Puan Maharani pernah menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode tahun 2014-2019. Setelah itu, dia menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode 2019-2024. Salah satu penghargaan yang diperolehnya yaitu perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diberikan oleh MURI (2015).



Gambar 1. Instagram Puan Maharani (https://www.instagram.com/ketua_dpri/)

Penelusuran digital (digital observation) ditemukan bahwa akun instagram Puan Maharani ada dua, yaitu @ketuadpri (https://www.instagram.com/ketua_dpri/) dan @puanmaharaniri (<https://www.instagram.com/puanmaharaniri/>). Akun Instagram @ketuadpri lebih banyak memuat postingan tentang kedinasan sebagai Ketua DPR RI sedangkan akun instagram @puanmaharaniri bercampur dan banyak memuat postingan Puan Maharani dengan keluarga besarnya. Akun instagram @ketuadpri memiliki 1.328 postingan, dan memiliki 80 ribu followers. Sementara itu, akun instagram @puanmaharaniri memiliki 1.996 postingan, dan memiliki 3,5 juta followers.

b. Tri Rismaharini

Hasil penelusuran peneliti pada situs *katadata.co.id* dikatakan bahwa Tri Rismaharini lahir pada tanggal 20 November 1961 di Kediri Jawa Timur. Dia merupakan Menteri Sosial Republik Indonesia yang dilantik pada 23 Desember 2020 pada Kabinet Indonesia Maju. Jabatan yang pernah diemban sebelumnya yaitu sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode. Tri Rismaharini pernah menerima penghargaan Adipura Kota Metropolitan tahun 2011 hingga 2014 secara berturut-turut.



Gambar 2. Akun Instagram Tri Rismaharini (<https://www.instagram.com/trirismaharini01/>)

Tri Rismaharini memiliki akun instagram paling banyak di antara Puan Maharani dan Khofifah Indar Parawansa. Hasil penelusuran yang peneliti lakukan ditemukan bahwa ada 17 akun instagram yang menggunakan foto profil Tri Rismaharini. Namun, ada empat akun instagram Tri Rismaharini yang memiliki followers di atas 1000 orang. Adapun akun instagram adalah @tri_rismaharini1 memiliki 122 postingan dan 5.641 followers (https://www.instagram.com/tri_rismaharini1/). Akun @trirismaharini.id memiliki 45 postingan dan 3.230 followers (<https://www.instagram.com/trirismaharini.id/>). Akun @trirismaharini.official memiliki 73 postingan dan 14 ribu followers (<https://www.instagram.com/trirismaharini.official/>). Akun @trirismaharini01 memiliki 12 postingan dan 45,8 ribu followers (<https://www.instagram.com/trirismaharini01/>).

c. Khofifah Indar Parawansa

Berdasarkan data yang diakses pada situs *jatim.inews.id/* dikatakan bahwa Khofifah Indar Parawansa lahir pada tanggal 19 Mei 1965. Khofifah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 13 Februari 2019. Sebelumnya, Khofifah pernah menjabat sebagai Menteri Sosial periode 2014-2019. Adapun penghargaan yang pernah diperoleh saat menjadi pejabat publik adalah meraih juara 1 pada kategori Daerah Terbaik Implementasi Perda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur pada ajang Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) tahun 2022.

Instagram

- Home
- Search
- Explore
- Reels
- Messages
- Notifications
- Create
- Profile
- More



khofifah.ip

Follow

Message

⋮

5,465 posts 1M followers 32 following

khofifah indar parawansa

Gubernur Jawa Timur
Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama

Followed by viaallen and aurelie.hemansyah

POSTS REELS TAGGED



Gambar 3. Akun Instagram Khofifah Indar Parawansa (<https://www.instagram.com/khofifah.ip/>)

Penelusuran digital yang dilakukan ditemukan bahwa ditemukan empat akun instagram yang menggunakan foto profil dan nama sebagai Khofifah Indar Parawansa. Akun yang paling banyak followersnya adalah @khofifah.ip memiliki 5.465 postingan dan 1 juta followers (<https://www.instagram.com/khofifah.ip/>). Akun instagram @khofifah_gubernur memiliki 11 postingan dan 62 followers (https://www.instagram.com/khofifah_gubernur/). Akun instagram @jrktapalkuda_khofifah memiliki 91 postingan dan 303 followers (https://www.instagram.com/jrktapalkuda_khofifah/). Terakhir, akun instagram @ibu_khofifahindarparawansa memiliki 1 postingan dan 126 followers (https://www.instagram.com/ibu_khofifahindarparawansa/).

Selanjutnya, data dari ketiga tokoh politisi perempuan muslim ini akan diuraikan, berkaitan dengan fokus penelitian ini yaitu menganalisis hasil data dengan konteks gender, sosial, dan politik. Media sosial yang digunakan sebagai sarana dalam mewujudkan identitas politik menjadi instrumen yang penting dalam penelitian ini. Peneliti menganalisis data Instagram pribadi dari ketiga politisi perempuan tersebut maka peneliti akan melihat bagaimana peran para politisi perempuan tersebut dalam komunitas politik maupun peranan mereka di keluarga.

Results And Discussion

I. Perempuan dalam Lingkaran Sejarah

Eksplotasi terhadap perempuan merupakan bentuk perampasan terhadap hak dasar atas kebebasan berpikir dan berkreasi yang harus dimiliki oleh manusia. Penafsiran terhadap Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34, "*Ar-rijālu qawwāmuna 'alan-nisā'i bimā faḍḍalallāhu ba'dahum 'alā ba'di..*" (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), yang salah kaprah dan menjadikannya sebagai legitimasi untuk mendiskreditkan perempuan. Keunggulan laki-laki diatas perempuan, yang kemudian menjadikan opini bahwa laki-laki berkuasa terhadap perempuan. Kondisi ini membuat kaum perempuan terdiskriminasi yaitu menempatkan laki-laki pada posisi yang menguntungkan (T. Saiful & Yuslim, 2020). Maka, para feminis muslim menyerukan bahwa ayat tersebut harus dipahami secara kontekstual tanpa mengesampingkan makna ayatnya secara tekstual. Gerakan feminis muslim ini berjihad untuk mengkampanyekan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap mendiskreditkan perempuan (Dianto, 2020; Icol Dianto, 2023).

Barat mengidentikkan Islam dengan isu kekerasan, radikal, dan bahkan dicap sebagai teroris (Anisa, 2020; Jennah et al., 2021). Kecaman tersebut perlahan mengalami perubahan, Negara-negara Islam menyadari bahwa framing media Barat merusak reputasi Islam yang rahmatan lil'alam, sehingga negara-negara Islam membangun kembali narasi-narasi yang mendiskreditkan Islam. Pentingnya untuk membangun kembali wacana terkait isu-isu keislaman (Wadud, 2006). Walaupun masih sering terjadi perlawanan dan konflik, dalam hal isi terkait dengan perempuan masih identik dengan persoalan yang kontroversi seperti wanita rumahan, cadar/hijab, sunatan bagi perempuan, dan persoalan klasik lainnya.

Kasus yang memprihatinkan, misalkan pemecatan pegawai negeri perempuan pada berbagai sektor yang ada di Negara Afganistan dengan alasan ajaran agama Islam. Ajaran Islam mengutarakan bahwa Allah SWT memberikan tugas kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa taat pada perintah dan larangan-Nya, yaitu agar manusia berbuat baik dan tidak mengutamakan kepentingan sendiri, bukan

untuk kepentingan popularitas, materi, sistem ekonomi, dan lainnya, kebebasan dan hak berlaku untuk laki-laki dan perempuan namun tidak bersifat mutlak (Ilyas, 2001).

Sebagai manusia, perempuan juga mempunyai hak untuk mewujudkan dan menyalurkan sisi kebaikan pada dirinya dalam segala aspek kehidupan, selain menjalankan hak-hak sesuai kemampuan dan berpedoman kepada tuntunan ajaran agama Islam (Khasanah, 2018). Kenyataan yang ada bahwa tidak seimbang antara idealitas dan realitas. Keadaan tersebut semakin dipertegas oleh pola hubungan kekuasaan yang merupakan bagian dari sistem masyarakat kapitalis modern sehingga membentuk masyarakat patriarki baru. Sehingga, semakin kuat hubungan kekuasaan membuat ketimpangan gender semakin terlihat (Ervienna, 2021).

Perempuan dikatakan cenderung memiliki peran domestik dan termasuk komoditas reproduktif, sedangkan laki-laki memiliki peran yang lebih tinggi dalam masyarakat seperti pembentukan struktur sosial dan budaya. Sejarah mencatat bahwa pemimpin perempuan dalam bidang politik baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam (Badran, n.d.) sangat strategis. Sebelum Islam, Ratu Bilqis yang diceritakan dalam Al-Qur'an, mampu memimpin rakyatnya atas kuasa tuhan dan masyarakat hidup dalam kondisi yang makmur (Wargianto, 2020). Di masa Islam, banyak guru dan tokoh yang berlatar belakang perawi hadis, kemudian pergerakan perempuan pada masa kekuasaan kesultanan di Aceh. Tokoh-tokoh perempuan di Indonesia yang memiliki kontribusi besar, seperti R.A. Kartini yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Rama El Yunusiyah, Nyi Ageng Serang di wilayah Banten, Cut Nyak Dien di wilayah Aceh merupakan tokoh perempuan yang memberikan kontribusi untuk kemajuan pergerakan perempuan di Indonesia (Noerdin, 2005).

2. Identitas Politik Perempuan

Kampanye politik yang berlangsung pada media sosial menjadi fenomena global. Aktor politik mengekspresikan diri secara kreatif melalui media sosial Instagram dilakukan organisasi politik tujuannya untuk membangun citra yang baik dalam pandangan masyarakat agar memperoleh dukungan suara yang banyak pada pemilihan umum (Diekman & Eagly, n.d.). Di antara banyaknya jenis media sosial

yaitu Instagram yang digunakan sebagai alat komunikasi politik. Instagram memiliki fitur-fitur yang ditawarkan yaitu budaya visual yang canggih sehingga dapat menyampaikan makna yang berbeda melalui video dan foto serta dilengkapi teks-teks yang menarik dan bahasa yang mudah dipahami sesuai dengan kontennya (Kozakowska & Kampka, 2021). Instagram menampilkan visual yang lebih efektif agar dapat mengendalikan agenda politik, menampilkan respon berlebihan, dan menyampaikan konten politik secara ringkas (Lalancette & Raynauld, 2017).

Kelompok yang menggunakan Instagram kemungkinan besar memudahkan kandidat yang berpotensi untuk berbagi informasi dengan biaya yang murah, lancar, interaktif, dan spontan sehingga memungkinkan komunikasi secara lebih akrab dan memberikan pesan yang lebih mudah kepada masyarakat, itulah alasan partai politik menggunakan media sosial (Rheault et al., 2019). Kampanye yang dilakukan melalui Instagram memudahkan untuk mengontrol citra pemerintahan dengan mengunggah konten politik pada media sosial tersebut.

Wacana politik disampaikan dan didukung dengan melalui saluran media sosial. Meskipun demikian, ada resiko yang diperoleh para politikus perempuan yang tidak sama dengan politikus laki-laki. Berbagai alasan membuat perempuan menghadapi berbagai hinaan, terutamanya sifat feminis perempuan yang dianggap masyarakat sebagai penghalang perempuan untuk berpolitik (Kariem et al., 2022). Pembahasan menarik yang dikaji dalam wacana perempuan dan politik menghasilkan stereotip pemimpin perempuan harus menaati aturan-aturan yang berlaku (Triadi & Aziz, 2019).

Munculnya penilaian yang diasosiasikan terhadap perempuan erat hubungannya dengan tingkat kualitas kerja yang rendah, pemimpin yang kurang dihargai, dan tidak diinginkan (Wibisono, n.d.). Perilaku sosial dan penampilan fisik seorang pemimpin perempuan dijadikan objek sehingga terjadi miskonsepsi terhadap pemimpin perempuan. Berlangsungnya siklus ini memperkokoh identitas gender yang bisa menghalangi upaya pemimpin perempuan untuk mengatasi krisis terhadap perkembangan opini politik yang pembahasannya perempuan sebagai pelaku politik (Vega Montiel, 2014).

Dugaan lainnya pemimpin laki-laki lebih kuat dari pemimpin perempuan. Sifat feminisme perempuan yang dianggap lemah, suara lembut, tidak bisa bersaing, dan terlalu emosional dianggap menghambat sistem politik yang seharusnya bersifat tegas untuk menangani urusan Negara (Ardiansa, 2017). Pemimpin perempuan dinilai lebih sesuai untuk menangani bidang pendidikan, lingkungan, dan kesehatan sedangkan pemimpin laki-laki tugasnya lebih sesuai pada bidang militer, pertahanan, politik, dan negara.

3. Diskusi

Karakteristik fisik perempuan sering dijadikan sudut pandang dalam menggambarkan kepemimpinan perempuan. Perempuan dianggap tidak memiliki pengaruh positif di saat menjadi pemimpin, khususnya posisi Walikota (Arvate et al., 2014). Perempuan bertanggung jawab atas kepribadian dan penampilannya sendiri, sedangkan konstruksi sosial menggambarkan identitas laki-laki dilihat secara eksklusif melalui wacana politik. Instagram menjadi pilihan politisi perempuan didasarkan pada faktor kecenderungan perempuan memperhatikan aspek-aspek fisik seperti pakaian, tinggi badan, berat badan, dan perhiasan yang dianggap sebagai penghalang literasi politik (Ayu, 2022).

Pemberitaan berfokus pada perempuan, maka fokus pemberitaannya adalah karakteristik pribadi pemimpin menentukan keputusan politik yang dibuat. Sejumlah struktur sosial mengenai identitas laki-laki yang tampak hanya berdasarkan pada opini masyarakat, dan kemudian mempersepsikan perempuan berkewajiban menjaga sikap, tingkah laku, dan penampilannya. Pandangan yang terbangun di masyarakat memberikan stereotip berdasarkan fisik terhadap pengelompokan identitas gender, yang mana identitas laki-laki digambarkan sebagai makhluk yang kuat dan identitas perempuan makhluk yang lemah tetapi menarik secara seksual (Zamroni, 2013). Penampilan meliputi busana, riasan wajah, berat dan tinggi badan disorot ketika dalam pemberitaan pemimpin perempuan. Penampilan fisik menjadi satu aspek dari beberapa aspek yang membuat pemimpin perempuan menarik di hadapan publik. Kondisi ini akibat dari stereotip fisik yang mengungkapkan bahwa

seseorang yang berpenampilan menarik akan memberikan kesan bahwa ia pribadi yang tenang, cerdas, dan sukses (Santoso, 2010).

Pemimpin perempuan sering menjadi objek stereotip dan diusik citra mereka sebagai politisi, Media sosial memberikan komentar yang memperkuat perubahan citra terhadap identitas perempuan dalam struktur masyarakat dan politik. Pandangan publik membatasi identitas perempuan dalam berpolitik dikarenakan alasan pribadi dari kehidupan seorang pemimpin perempuan. Masyarakat mengikat pada hal-hal seperti status perkawinan, sosok pasangannya, keberpihakan (Marhumah, 2011). Hal yang lebih mengkhawatirkan bagi politisi perempuan masih sering menerima komentar buruk dari masyarakat melalui media sosial dibanding kaum laki-laki. Walaupun stereotip terhadap identitas politik perempuan tidak bisa dihindari diperlukan perjuangan yang lebih untuk dapat menyeimbangkan perannya di dunia politik.

Tantangan bagi perempuan ketika berpolitik harus bisa menangkal anggapan bahwa tanggung jawab domestik tidak harus dikorbankan untuk tetap bisa sukses di dunia politik. Hasil penelitian ditemukan bahwa isi unggahan ketiga politisi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara pekerjaan mereka sebagai pejabat Negara dan partai politik. Meskipun begitu, peneliti menemukan konten berupa foto yang diunggah di Instagram pribadi ketiga politisi tersebut juga berisi tema keluarga. Hal itu memberikan makna bahwa para tokoh politisi perempuan tersebut masih tetap menekan peran penting keluarga. Namun di sisi lain, politisi perempuan itu, Puan Maharani, Tri Rismaharani, Khofifah Indar Parawansa, dalam konteks komunikasi politik, memberikan pesan bahwa mereka bisa sukses dalam dunia politik namun tidak mengabaikan keluarga. Hal ini membantah pandangan (stereotip) bahwa perempuan lemah dalam karier politik. Hal ini membantah pendapat yang mengatakan bahwa perempuan kurang menguntungkan karena perannya sebagai ibu, istri, anak, dan saudara perempuan yang dipandang sulit beradaptasi pada dunia politik (Kaltsum, 2022).

Para politisi perempuan ini, Puan Maharani, Tri Rismaharani, Khofifah Indar Parawansa telah membuktikan bahwa masalah gender tidak seharusnya menjadi

senjata untuk mengabaikan perempuan di dunia politik. Isu-isu yang berkaitan dengan fisik perempuan melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan tersebut menjadi identitas perempuan berdasarkan ciri-ciri fisiknya, seperti kecantikan, bentuk tubuh, usia, penampilan dan sebagainya (Kambo, 2017). Pemimpin perempuan secara fisik lebih lemah dari laki-laki. Bahkan, perempuan juga dianggap lemah secara mental dan tidak memiliki jiwa untuk bersaing, dan terlalu mengutamakan perasaan. Sehingga, perempuan sulit menghadapi situasi politik.

Politikus Perempuan	Jumlah C & Like	Kategori Profesi	Kategori Politik	Kategori Keluarga	Kategori Keagamaan	Kategori Nasionalisme
Puan Maharani	Comments	1.022	567	1.080	530	615
	Like	26.347	20.830	98.230	38.331	39.394
Tri Rismaharini	Comments	20	27	25	9	48
	Like	397	653	468	160	363
Khofifah Indar Parawansa	Comments	43	69	52	69	87
	Like	18.039	18.995	24.549	15.487	24.390

Tabel 1. Tingkat respon para pengikut Instagram ketiga politisi perempuan tersebut terhadap lima jenis kategori konten berbentuk foto.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Instagram ketiga tokoh politik perempuan tersebut menjadi perwakilan dari masyarakat Indonesia. Followers yang memberikan respon dalam bentuk tanda suka, komentar, dan share konten memperlihatkan bahwa para politisi perempuan itu dapat dikatakan berhasil menarik simpatik masyarakat konstituennya dengan membagikan konten keluarga di Instagram. Konten keluarga dapat mewakili kehangatan, cinta, dan kebahagiaan yang diidamkan oleh banyak kehidupan rumah tangga, termasuk di Indonesia.

Kategori konten bertema keluarga menunjukkan skor yang lebih tinggi dari empat kategori lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa kebanyakan masyarakat lebih

tertarik pada kehidupan intim dari politisi perempuan dibanding konten politik. Karakteristik penampilan fisik, status perkawinan, serta sisi pribadi dari pemimpin perempuan cukup sering dibahas pada media sosial untuk memastikan dan memperkuat narasi politik dari kaum perempuan.

Conclusion

Peneliti menyimpulkan bahwa konten yang diunggah tidak hanya mencakup aktivitas politik dan profesi, tetapi juga aspek kehidupan pribadi, termasuk momen bersama keluarga. Politisi perempuan tidak hanya menonjolkan sisi politik dan profesional, tetapi juga berusaha memperlihatkan kehidupan pribadi mereka di Instagram. Temuan ini menggambarkan peran politisi perempuan dalam menghadapi stereotip gender. Politisi perempuan yang menjadi fokus penelitian menempati jabatan yang berbeda-beda namun peran mereka secara keseluruhan tetap aktif untuk kepentingan bangsa dan Negara, sambil menjalankan peran sebagai domestik di dalam keluarga. Penelitian ini menyoroti ketergantungan ketiga politisi tersebut pada Instagram sebagai alat untuk membangun citra politik mereka. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk dapat membandingkan respon masyarakat terhadap konten politisi perempuan dan laki-laki di media sosial, untuk mengukur sejauh mana penggunaan media sosial di kalangan politisi perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Instagram menjadi sarana penting bagi politisi perempuan untuk membangun citra diri dalam dunia politik.

References

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Amaliatulwalidain, Putri, D. E., & Kencana, N. (2022). *Peran Politik Perempuan Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang*. 7(1), 41.
- Anisa, D. (2020). *Hegemoni Wacana Islamophobia*. Guepedia.
- Ardiansa, D. (2017). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, 2(1), 71. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.82>

- Arvate, P., Firpo, S., & Pieri, R. (2014). *Gender stereotypes in politics: What changes when a woman becomes the local political leader?* *sad paulo school of economics*.
- Ayu, N. A. (2022). Optimalisasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Gender Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 4(2), 126–140. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i2.86>
- Badran, M. (n.d.). *Feminism in Islam: Secular And Religious Convergences*. Oneworld Oxford.
- Bahri S, A. (2015). *Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)*. 8(2).
- Beers, S. (2014). *Shallow or Rational Public Spheres? Indonesian Political Parties in the Twitter-Sphere*. 6(2), 2.
- Bossetta, M. (2018). *The Digital Architectures of Social Media: Comparing Political Campaigning on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat in the 2016 US. Election*. 95(2), 473.
- Dianto, I. (2020). Diskriminasi Gender: Kajian terhadap penamaan “Janda Bolong” dalam Perspektif Konstruktivisme Media. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 16(2), 1–25.
- Dianto, I., Bakti, A. F., & Rosyidin, I. (2021). Ideological and media discourse study of Nasrudin Joha’s political article. *Islamic Communication Journal*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.21580/icj.2021.6.2.8140>.
- Dianto, Icol. (2023). Gender Issues in Student Scientific Papers: Study of Student Thesis of Faculty of Da’wah and Communication Sciences UIN Syahada Padangsidempuan, Indonesia. *International Journal of Social Science And Human Research*, 6(11), 6674–6683. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i11-13>
- Diekmann, A. B., & Eagly, A. H. (n.d.). *Stereotypes as Dynamic Constructs: Women and Men of the Past, Present, and Future*.

- Erviena, E. (2021). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah dengan Perspektif Qira'ah Mubadala*. Institut PTIQ Jakarta.
- Fahmy, S., Bock, M. A., & Wanta, W. (2014). *Visual Communication Theory and Research: A Mass Communication Perspective*. Martin's Press LLC.
- Hidayati, F. R. (2021). Komunikasi Politik dan Branding Pemimpin Politik Melalui Media Sosial: A Conceptual Paper. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.51544/jlmlk.v5i2.2385>
- Ilyas, H. Y. (2001). *Perspektif Gender dalam Islam*, 3.
- Iwanaga, K. (2008). *Women's political participation and representation in Asia: Obstacles and challenges*. NIAS press.
- Jannah, R., Surawan, S., & Athaillah, M. (2021). *Isu-Isu Dunia Islam Kontemporer: Sebuah Pendekatan Multi Perspektif*. K-Media.
- Kaltsum, A. U. (2022). *Identitas Politik Perempuan dalam Masyarakat Adat Kajang Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Kambo, G. A. (2017). *Penguatan Identitas Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah*. 3(1).
- Kariem, M. Q., Akhbar, M. A., & Oktarena, C. D. (2022). *Collaborative Governance dalam Masa Reses DPRD Kabupaten Banyuwangi*, 7(1), 71.
- Khasanah, A. N. (2018). *Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Khusairi, A. (2019). *Diskursus Islam Kontemporer di Media Cetak: Kajian terhadap Radikalisme dalam Artikel Populer Surat Kabar Harian Kompas dan Republika 2013 – 2017 [Disertasi]*. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kozakowska, K. M., & Kampka, A. (2021). *Creative reconstructions of political imagery in an Instagram-based election campaign: Implications for visual rhetorical literacy*. 14(2), 308.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis An Introduction to Its Methodology*. Sage Publications.

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2022). *Qur'an Kemenag*.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>
- Lalancette, M., & Raynauld, V. (2017). *The Power of Political Image: Justin Trudeau, Instagram, and Celebrity Politics*. 3. <https://doi.org/org/10.1177/0002764217744838>
- Marhumah. (2011). *Konstruksi Gender, Hegemoni Kekuasaan, dan Lembaga Pendidikan*, 19(2).
- Musdalifah, F. S., Nasyaya, A., & Pratiwi, M. (2022). *Media Sosial dan Politisi Perempuan di Indonesia: Analisis Konten Pada Sembilan Akun Instagram Perempuan Anggota Legislatif*. 7(4).
- Noerdin, E. (2005). *Politik identitas perempuan Aceh* (Cet. 1). Women Research Institute.
- Patterson, T. E. (2016). *Social Media: Advancing Women in Politics?* Harvard University's Kennedy School of Government.
- Prihatiningrum, S., & Kusmiati, Y. (2023). Efektivitas Akun Instagram @Aniesbaswedan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik. *Wardah*, 24(1), 179–194.
<https://doi.org/10.19109/wardah.v24i1.17518>
- Rheault, L., Rayment, E., & Musulan, A. (2019). *Politicians in the line of fire: Incivility and the treatment of women on social media*. 2.
<https://doi.org/doi.org/10.1177/2053168018816228>
- Rosyidah, F. N., & Nurwati, N. (2019). Gender dan Stereotipe: Konstruksi Realitas dalam Media Sosial Instagram. *Share : Social Work Journal*, 9(1), Article 1.
<https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19691>
- Sakdiah. (n.d.). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran Karya Prof. Dr. Nasaruddin Umar*, MA
- Santoso, W. M. (2010). *Identitas, Politik, Tubuh Perempuan dan Media Televisi*, 1.
- Susanto, R. D., & Irwansyah. (2021). Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>
- T. Saiful, Y., & Yuslim, A. F. (2020). Gender Equality Perspective and Women Position in Islam. *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Islamic Society*

- (ICOLGIS 2019). International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019), Banda Aceh, Indonesia.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.212>
- Triadi, R. B., & Aziz, F. (2019). Konstruksi Media pada Politikus Wanita: Judul Pemberitaan Kasus Hoaks Tokoh Politik Perempuan di Media Massa Online Indonesia. *DEIKSIS*, 11(02), 140. <https://doi.org/10.30998/deiksis.v11i02.3636>
- Turnbull, S. J., & Dugarte. (2019). *Selfies, Policies, or Votes? Political Party Use of Instagram in the 2015 and 2016 Spanish General Elections*. 7.
<https://doi.org/doi.org/10.1177/2056305119826129>
- Vega Montiel, A. (2014). *Media and gender: A scholarly agenda for the global alliance on media and gender*. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.
- Wadud, A. (2006). *Inside the gender Jihad: Women's reform in Islam*. Oneworld.
- Wargianto, D. (2020). *Gender dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Kisah Nabi Adam as)*. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Wibisono, R. B. (n.d.). *Pencapaian Identitas Politik Perempuan di Indonesia dalam Kurun Waktu 2009-2017: Studi Tentang Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender*.
- Zamroni, M. (2013). *Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender*, 14(1).